

Kerja sama Internasional

A. Kerja Sama

Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dilakukan dengan saling bersinergi dan berkolaborasi dalam suatu kegiatan. Kerja sama internasional adalah hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Tentunya, setiap negara mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dan warganya. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi penting untuk kesejahteraan masyarakat.

SDGs menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara bersamaan, dengan prinsip "tidak ada yang tertinggal" (*leave no one behind*). SDGs menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015.

Macam-macam Kerjasama

Kerja sama internasional dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu;

a. Bilateral

Kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerja sama ini umumnya bersifat saling menguntungkan dan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan.

Contoh: **Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)**

IK-CEPA adalah bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea dalam rangka meningkatkan perdagangan dengan menghapuskan tarif pada sejumlah besar barang. Pada tahun 2022, total perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan mencapai sekitar USD 20,6 miliar, dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 712,3 juta.

Indonesia berperan aktif dalam negosiasi dan implementasi IK-CEPA dengan mengusulkan kebijakan yang mendukung peningkatan perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada pengusaha mengenai manfaat perjanjian ini, serta memfasilitasi pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan kapasitas eksportir Indonesia agar dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar Korea Selatan.

b. Regional

Kerja sama yang dilakukan antarnegara dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kerja sama regional dapat meningkatkan hubungan antarnegara di kawasan tersebut dalam berbagai bidang, seperti keamanan, pendidikan, politik dan sebagainya.

Contoh: **ASEAN Free Trade Area (AFTA)**

AFTA adalah bentuk kerja sama ekonomi dalam organisasi ASEAN yang bertujuan untuk mengahpauskan tarif dan kuota perdagangan antar negara anggota sehingga mendukung perdagangan yang lebih bebas dan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan.

Indonesia aktif dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membahas isu-isu perdagangan dan ekonomi, serta berkontribusi dalam kebijakan yang mendorong integrasi ekonomi di kawasan. Selain itu, Indonesia juga memfasilitasi dialog antara negara anggota untuk memastikan kesepakatan AFTA dapat diimplementasikan secara efektif, termasuk memberikan dukungan teknis kepada negara-negara anggota yang membutuhkan bantuan dalam penyesuaian kebijakan perdagangan mereka.

c. Multilateral

Kerja sama yang melibatkan lebih dari 2 negara tanpa pembatasan kawasan atau wilayah tertentu. Bentuk kerja sama multilateral sering kali dilakukan melalui organisasi internasional.

Contoh: **Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR)**

Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) adalah forum multilateral yang diorganisir oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Forum ini bertujuan untuk menilai dan mendiskusikan kemajuan dalam pelaksanaan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, yang merupakan kerangka kerja global untuk mengurangi risiko bencana. GPDRR menyediakan platform bagi negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengurangan risiko bencana.

Dalam kerjasama GPDR, Indonesia berperan aktif dengan;

- a. Menjadi tuan rumah acara ke-7 yang diadakan di Bali pada tahun 2022.
- b. Menyusun agenda diskusi yang berfokus pada pengurangan risiko bencana, berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam manajemen bencana.

B. SDGs

I. Deskripsi dan Tujuan

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari *2030 Agenda for Sustainable Development*. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Harapannya, semua orang dapat menikmati kesejahteraan dan keberlanjutan dunia ini pada tahun 2030.

Tujuan utama dari SDGs terdiri dari 17 tujuan, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi.
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia.
4. Memberikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan serta mengelola hutan secara berkelanjutan.
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan untuk semua, serta membangun lembaga-lembaga efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.
17. Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Indikator

1. Menjamin Akses Pendidikan Dasar dan Menengah

Akses pendidikan dasar dan menengah adalah hal penting untuk memastikan semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Jika mereka bisa menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Sebaliknya, jika mereka tidak bisa bersekolah karena masalah biaya atau jarak, mereka akan sulit bersaing di dunia kerja, dan hal ini bisa memperburuk kemiskinan keluarga mereka.

Saat ini, di Indonesia, hampir semua anak berhasil menyelesaikan pendidikan dasar. Pada tahun 2022, 99,5% anak-anak sudah lulus dari sekolah dasar. Namun, tidak semua anak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, seperti SMP dan SMA.

Hanya sekitar 70% anak yang bisa menyelesaikan pendidikan menengah. Masalah terbesar yang dihadapi adalah banyaknya anak di daerah terpencil yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena sekolahnya jauh dari rumah, fasilitasnya kurang memadai, atau tidak ada guru yang cukup. Pemerintah terus berusaha membangun lebih banyak sekolah dan mendistribusikan guru ke daerah-daerah yang membutuhkan agar semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak

2. Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membentuk kemampuan dasar anak sebelum mereka masuk ke sekolah dasar. Anak-anak yang mengikuti PAUD biasanya lebih siap secara mental, sosial, dan akademis. Jika mereka tidak mendapatkan pendidikan ini, mereka mungkin akan kesulitan beradaptasi di sekolah.

Di Indonesia, semakin banyak anak yang mengikuti PAUD, tetapi masih ada 30% anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di PAUD. Program seperti Indonesia Pintar berusaha membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar bisa masuk PAUD. Namun, di beberapa daerah, terutama di desa atau wilayah terpencil, masih banyak PAUD yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap atau tenaga pendidik yang terlatih. Akibatnya, anak-anak di daerah tersebut belum mendapatkan pendidikan usia dini yang maksimal.

3. Pendidikan Teknik dan Kejuruan

Pendidikan teknik dan kejuruan membantu siswa memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK atau program kejuruan lainnya diharapkan bisa langsung bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Jika pendidikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri, lulusan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Saat ini, sekitar 30,28% siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi atau mengikuti pelatihan kejuruan. Pemerintah terus memperkuat program vokasi agar lebih banyak siswa yang siap kerja setelah lulus. Meskipun begitu, banyak lulusan SMK yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang mereka miliki belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, sekolah-sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan industri agar siswa bisa mendapatkan pelatihan praktik yang lebih sesuai dengan dunia kerja

4. Keterampilan Relevan untuk Pekerjaan

Keterampilan yang relevan dengan dunia kerja sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Jika lulusan memiliki keterampilan seperti teknologi, komunikasi, dan keterampilan teknis lainnya, mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai, mereka mungkin akan menganggur.

Pemerintah telah meluncurkan program Kartu Prakerja untuk membantu orang-orang yang ingin belajar keterampilan baru. Sejak tahun 2020, lebih dari 17 juta orang telah

mengikuti pelatihan melalui program ini. Program ini bertujuan agar lebih banyak orang yang bisa bersaing di dunia kerja. Namun, meskipun sudah banyak yang mengikuti pelatihan, tingkat pengangguran di kalangan pemuda masih cukup tinggi. Banyak lulusan sekolah yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan

5. Penghapusan Diskriminasi dalam Pendidikan

Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Jika diskriminasi dihilangkan, semua anak akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Sebaliknya, jika diskriminasi masih ada, kesenjangan sosial akan semakin besar.

Meskipun sudah ada banyak kemajuan dalam hal partisipasi anak perempuan di sekolah, di beberapa daerah pedesaan masih ada kesenjangan. Selain itu, sekitar 4,4 juta anak di Indonesia masih mengalami putus sekolah, terutama dari keluarga yang kurang mampu atau dari kelompok rentan. Pemerintah terus berusaha memastikan semua anak, tanpa terkecuali, bisa bersekolah dengan menyediakan program beasiswa dan meningkatkan fasilitas sekolah yang ramah untuk anak-anak penyandang disabilitas.

6. Literasi dan Numerasi Universal

Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung adalah keterampilan dasar yang sangat penting. Orang yang memiliki kemampuan ini akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki kemampuan ini, mereka akan kesulitan dalam banyak hal.

Namun, di Indonesia, banyak siswa yang masih memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Hasil tes internasional seperti PISA menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah agar kemampuan literasi dan numerasi siswa bisa lebih baik.

7. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan mengajarkan siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Jika siswa memiliki pengetahuan ini, mereka akan lebih peduli terhadap lingkungan dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan.

Beberapa sekolah di Indonesia sudah mulai mengajarkan isu keberlanjutan dalam kurikulum mereka. Siswa diajarkan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, dan menjaga hutan. Nyatanya, kami dapat melihat sendiri dari sekolah Santa Ursula Jakarta yang mengajarkan cinta lingkungan melalui berbagai program. Namun, masih banyak sekolah yang belum memiliki program yang kuat tentang

keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong lebih banyak sekolah untuk memasukkan topik ini dalam kegiatan belajar

8. Fasilitas Pendidikan Inklusif dan Aman

Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap membuat siswa merasa nyaman dan aman untuk belajar. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat mereka lebih semangat belajar. Fasilitas seperti toilet yang bersih, akses air minum, dan ruang kelas yang nyaman sangat penting. Namun, di Indonesia, sekitar satu dari tiga sekolah masih belum memiliki toilet yang terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan. Selain itu, banyak sekolah di desa atau daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Pemerintah terus berusaha memperbaiki fasilitas sekolah agar semua siswa, termasuk yang berada di daerah terpencil, bisa belajar dengan nyaman

9. Beasiswa untuk Pendidikan Tinggi

Beasiswa pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dengan beasiswa, mereka bisa belajar tanpa harus khawatir tentang biaya. Program beasiswa pemerintah telah membantu jutaan siswa di Indonesia, tetapi masih banyak mahasiswa yang menghadapi kendala keuangan untuk melanjutkan studi mereka. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah dan cakupan beasiswa agar lebih banyak siswa bisa melanjutkan pendidikan tinggi

10. Peningkatan Kualitas Guru

Guru yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Guru yang terlatih dengan baik bisa mengajar dengan lebih efektif dan membuat siswa lebih paham pelajaran. Di Indonesia, sekitar 46% guru telah tersertifikasi, tetapi ini masih jauh dari target nasional sebesar 77%. Banyak guru di daerah terpencil juga membutuhkan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka. Pemerintah terus mengadakan program pelatihan dan sertifikasi agar kualitas guru di seluruh Indonesia bisa meningkat

Program Kerja Sama SDGs Quality Education (Jelaskan juga peran Indonesia dalam kerjasamanya)

Bilateral: IKTE (Indonesian-Korean Teacher Exchange)

Apa Itu Program IKTE?

IKTE adalah program yang dimulai pada tahun 2009 untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pertukaran guru antara Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan program ini adalah untuk membantu guru-guru di Indonesia agar bisa belajar cara mengajar yang lebih baik dengan melihat metode pengajaran di Korea Selatan, yang sudah lebih maju dan menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, para guru Indonesia juga mengenal budaya Korea Selatan lebih dalam, begitu pula sebaliknya.

Bagaimana Program Ini Dilaksanakan?

Proses pelaksanaan program ini dimulai dengan seleksi guru-guru yang akan berpartisipasi. Seleksi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman mengajar guru tersebut. Setelah dipilih, guru Indonesia diberikan pelatihan mengenai sistem pendidikan Korea Selatan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan berbagai metode pengajaran yang sudah sukses di sana. Guru-guru Indonesia yang terpilih kemudian mengajar di sekolah-sekolah Korea Selatan untuk beberapa bulan. Di sana, mereka belajar langsung dari pengalaman mengajar di kelas. Sebaliknya, guru-guru Korea Selatan juga datang ke Indonesia untuk mengajar dan berbagi pengalaman mengenai pendidikan di negara mereka.

Dampak bagi Indonesia dan Negara Mitra

Bagi Indonesia, manfaat utama dari program ini adalah peningkatan kemampuan guru dalam mengajar. Para guru yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menggunakan teknologi untuk mengajar dan menerapkan metode yang lebih interaktif dan menyenangkan. Ini tentu membuat kualitas pengajaran di Indonesia semakin baik, terutama dengan cara-cara yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi Korea Selatan, program ini memberi mereka kesempatan untuk memahami tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam dunia pendidikan. Mereka bisa menyesuaikan cara mengajar mereka dengan budaya dan kondisi di Indonesia, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan yang saling menguntungkan.

Pencapaian Nyata

Program IKTE telah berhasil mengirim lebih dari 100 guru Indonesia ke Korea Selatan. Banyak guru yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti program ini dan langsung mengaplikasikan metode pengajaran berbasis teknologi yang mereka pelajari. Hal ini telah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, program ini juga memperkuat hubungan kerja sama antara sekolah-sekolah di Indonesia dan Korea Selatan.

IKTE (Indonesian-Korean Teacher Exchange) berperan besar dalam mendukung SDGs 4 karena program ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini membantu para guru di Indonesia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam cara mengajar, termasuk penggunaan teknologi dan metode yang lebih modern dan interaktif. Dengan peningkatan kemampuan guru, siswa di Indonesia akan mendapatkan pelajaran yang lebih menarik dan bermanfaat. Ini akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan menggunakan teknologi dengan baik. Hal ini mendukung indikator tentang penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, karena dengan pengajaran yang lebih baik, siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal.

Dengan guru yang lebih terampil, kualitas pendidikan di Indonesia juga meningkat, yang berarti lebih banyak siswa bisa belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan

perkembangan zaman. Program ini membantu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bisa diakses oleh semua kalangan, tanpa ada yang tertinggal. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Regional: ASEAN Credit Transfer System (ACTS)

ACTS adalah program yang dimulai pada tahun 2011 untuk memudahkan mahasiswa di kawasan ASEAN (termasuk Indonesia) untuk melanjutkan studi di universitas-universitas negara ASEAN lainnya tanpa kehilangan kredit yang telah mereka peroleh. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar negeri, tetapi tetap mendapatkan pengakuan atas kredit yang mereka peroleh di universitas asal mereka.

Universitas-universitas di negara-negara ASEAN bekerja sama untuk menyelaraskan kurikulum mereka, sehingga kredit yang diperoleh mahasiswa di satu universitas bisa diakui di universitas lain yang ikut serta dalam program ini. Mahasiswa Indonesia yang ingin mengikuti program ACTS mendaftar di universitas yang berpartisipasi, dan kemudian mereka bisa melanjutkan studi di universitas mitra di negara ASEAN. Setelah mereka selesai mengikuti program studi di luar negeri, kredit yang mereka peroleh tetap diakui di universitas asal mereka di Indonesia.

ACTS memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa Indonesia. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan standar internasional dan juga mempelajari budaya negara lain. Hal ini membantu mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan mengembangkan keterampilan yang lebih siap untuk bekerja di dunia global. Bagi negara mitra, program ini memberi kesempatan untuk mengenalkan sistem pendidikan mereka kepada mahasiswa Indonesia dan memperkuat hubungan kerja sama antara universitas-universitas di ASEAN.

Sejak diluncurkan, lebih dari 20 universitas di Indonesia telah ikut serta dalam program ACTS. Ribuan mahasiswa Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, dan mereka membawa pulang pengalaman yang berharga untuk diterapkan di Indonesia.

ACTS (ASEAN Credit Transfer System) sangat mendukung pencapaian SDGs 4.

Program ini mendukung Indikator yang berfokus pada akses ke pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas. Dengan mendukung mobilitas mahasiswa antar negara ASEAN, ACTS memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri tanpa khawatir tentang kehilangan kredit akademik mereka. Selain memberikan pengalaman akademik yang lebih luas, program ini juga memperkaya pengalaman budaya mahasiswa, yang membantu mereka untuk memahami keberagaman global. Ini sejalan dengan Indikator “meningkatkan keterampilan teknis dan kejuruan” untuk pekerjaan yang layak, karena mahasiswa yang terlibat dalam program ini dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. ACTS juga mendorong

kerja sama antar universitas di negara-negara ASEAN, memperkuat pendidikan tinggi di Indonesia dan membuka lebih banyak kesempatan belajar untuk mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Multilateral: Global Partnership for Education (GPE)

GPE adalah kemitraan internasional yang dimulai pada tahun 2002 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia bergabung dengan GPE pada tahun 2009 dan mendapatkan berbagai bantuan, seperti pendanaan dan dukungan teknis untuk proyek-proyek pendidikan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Program GPE di Indonesia dimulai dengan pemetaan kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau. GPE bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merancang proyek-proyek pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, melatih guru, serta meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Program ini juga berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal agar mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan.

Di Indonesia, GPE telah membantu memperbaiki akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dengan membangun lebih banyak sekolah dan memperbaiki fasilitas pendidikan. Selain itu, ribuan guru telah dilatih untuk meningkatkan cara mengajar mereka. Di negara mitra, GPE juga membantu memperkuat sistem pendidikan mereka dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Melalui GPE, banyak sekolah di Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas yang baik, sekarang dapat menyediakan pendidikan yang lebih layak. Lebih dari 100.000 guru di Indonesia telah dilatih untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, yang hasilnya dapat dilihat dalam peningkatan keterampilan siswa.

Global Partnership for Education (GPE) berperan besar dalam mendukung SDGs 4 di Indonesia.

Program ini mendukung tujuan tentang pembangunan fasilitas pendidikan yang ramah anak. Dengan bantuan GPE, Indonesia dapat memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang berada di lokasi yang sulit dijangkau, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Program ini juga berkontribusi untuk menekankan peningkatan jumlah guru terlatih, dengan mendanai pelatihan guru-guru di Indonesia agar mereka dapat mengajar dengan cara yang lebih efektif. Keterampilan mengajar yang ditingkatkan ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, GPE mendukung penyediaan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, sejalan dengan indikator yang bertujuan meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi mereka yang kurang beruntung secara finansial.

C. Dampak

Kerja sama internasional di bidang pendidikan memberikan berbagai dampak positif dan negatif baik bagi Indonesia maupun dunia secara global, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs 4, yang bertujuan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua.

Dampak Global

Kerja sama internasional membawa dampak positif bagi dunia, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara global. Negara-negara dapat saling bertukar pengetahuan dan praktik terbaik dalam kebijakan pendidikan, yang bisa diterapkan untuk memperbaiki sistem pendidikan di masing-masing negara. Program pertukaran pelajar, seperti yang dilakukan oleh ACTS, memungkinkan mahasiswa dari berbagai negara untuk saling belajar dan memahami budaya lain, yang meningkatkan mobilitas pelajar secara global. Ini juga membantu siswa dan guru untuk mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja global, yang membuka peluang bagi mereka untuk bekerja di berbagai negara. Selain itu, kerja sama internasional mendorong inovasi dalam pendidikan, baik dari segi metode pengajaran maupun teknologi pendidikan. Kolaborasi antar negara membantu menemukan cara-cara baru untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan, yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran di seluruh dunia.

Secara global, kerja sama internasional juga dapat menimbulkan dampak negatif. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan pendidikan secara global, masih ada kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal akses ke sumber daya pendidikan. Dalam beberapa kasus, kerja sama ini juga dapat menciptakan kompetisi yang tidak sehat antara negara-negara dalam memperoleh dana dan sumber daya pendidikan. Selain itu, terkadang, standar pendidikan yang diterapkan oleh negara maju tidak selalu cocok dengan konteks budaya negara berkembang, yang bisa membuat pendidikan kurang relevan dengan kebutuhan lokal. Ada juga risiko bahwa budaya asing yang dibawa dalam kerja sama internasional tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai atau tradisi yang ada di masyarakat lokal, yang bisa menimbulkan kehilangan budaya. Tidak kalah penting, negara-negara berkembang mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan praktik pendidikan terbaik dari negara maju karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas manusia.

Dampak bagi Indonesia

Kerja sama internasional membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan keterampilan guru. Program seperti IKTE (Indonesian-Korean Teacher Exchange) memungkinkan guru Indonesia untuk mempelajari metode pengajaran yang lebih modern dan efektif. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Selain itu, kerja sama ini juga memberikan akses ke teknologi dan sumber daya pendidikan yang lebih canggih, yang membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih menarik dan relevan

dengan perkembangan zaman. Program seperti ASEAN Credit Transfer System (ACTS) juga memberi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri tanpa kehilangan kredit akademik. Ini memperluas wawasan mahasiswa dan memberi mereka pengalaman belajar yang lebih beragam. Dengan adanya beasiswa dari kerja sama internasional, siswa dari keluarga kurang mampu juga bisa mendapatkan pendidikan berkualitas yang sebelumnya sulit diakses. Semua ini membuka lebih banyak kesempatan belajar bagi berbagai kalangan dan mendukung kesetaraan dalam pendidikan di Indonesia.

Namun, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Kerja sama internasional kadang-kadang membuat Indonesia terlalu bergantung pada sistem pendidikan luar negeri, tanpa memperhitungkan kondisi lokal. Biaya untuk melaksanakan program internasional juga seringkali sangat tinggi, yang bisa menjadi beban bagi anggaran pendidikan negara. Selain itu, masih ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses ke program pendidikan internasional ini, yang menyebabkan ketimpangan pendidikan. Terkadang, kerja sama ini juga dapat membawa budaya asing yang melupakan budaya lokal, yang bisa mengurangi keberagaman budaya dalam konteks pendidikan. Selain itu, kualitas pelatihan guru dari luar negeri tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, sehingga tidak semua program pelatihan tersebut memberikan manfaat yang maksimal.

D. Implementasi Pancasila

Sila ke-2

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengajarkan bahwa semua orang adalah sederajat, tanpa memandang jenis kelamin dan latar belakang. Hal ini juga berlaku dalam kerja sama internasional. Dalam konteks kerja sama internasional, prinsip ini mengajak negara-negara untuk bekerja bersama dengan saling menghargai, tanpa ada pihak yang merasa lebih unggul atau lebih rendah. Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs 4, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang. Setiap negara, baik yang berkembang maupun maju, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi warganya, tanpa terkecuali. Setiap orang berhak mendapat pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang jenis kelamin ataupun latar belakang mereka. Dengan begitu, kerja sama internasional bisa terlaksana dengan rasa tanggung jawab dan saling mendukung, memperkuat tujuan global untuk pendidikan yang adil dan berkualitas.

Sila ke-3

Prinsip sila ke-3 sangat relevan dalam konteks kerja sama internasional, terutama dalam mencapai tujuan SDGs 4 mengenai pendidikan berkualitas. Dalam kerja sama internasional, kita perlu menumbuhkan rasa persatuan, baik di dalam negara maupun antarnegara, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua. Hal ini mengharuskan semua negara, meskipun memiliki perbedaan, untuk bekerja sama secara harmonis dan bersatu dalam upaya memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh warga dunia. Kerja sama ini harus

mengedepankan semangat untuk saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, tanpa adanya pemisahan atau perpecahan di antara negara-negara yang terlibat.

Sila ke-4

Sila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" mengajarkan kita bahwa dalam setiap kerja sama internasional, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah dan melibatkan perwakilan dari semua negara yang terlibat. Jika dilihat dari konteks SDGs, kerja sama dalam pendidikan memerlukan kebijakan yang didiskusikan dan disepakati bersama, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan masing-masing negara. Setiap negara harus memiliki suara dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kebijaksanaan yang mempertimbangkan keberagaman dan kepentingan bersama. Selain itu, dalam menghadapi perbedaan pendapat antarnegara, dibutuhkan sikap menerima hasil dengan lapang dada.

Sila ke-5

Sila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," sangat penting dalam kerja sama internasional, terutama dalam memastikan keadilan dalam akses terhadap pendidikan. Dalam konteks SDGs 4, semua negara harus berusaha agar pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Kerja sama internasional harus mengedepankan keadilan, sehingga negara-negara berkembang dapat menerima dukungan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan mereka. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses pendidikan, dan semua negara harus berusaha agar setiap individu, di manapun mereka berada, bisa memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas. Dengan penerapan sila ke-5 dalam menjalankan kerjasama ini, dapat menjadikan negara lebih sejahtera.

E. Refleksi

Saran

Kesimpulan